KR-Ariswanto

Danrem 072 Pamungkas menyerahkan paket sembako untuk warga miskin terdampak pandemi Covid-19 di Wonosobo.

TINJAU PELAKSANAAN TMMD

Danrem Bagikan Sembako

WONOSOBO (KR) - Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Kolonel Arh Ibnu Bintang Setiawan meninjau proyek TMMD Sengkuyung Tahap II di Desa Pungangan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, Minggu (19/7). Danrem juga membagikan ratusan paket sembako untuk warga miskin terdampak pandemi virus Korona (Covid-19).

"Bantuan ini berasal dari donasi Alumni Akabri (TNI-Polri) 1989. Jumlah bantuan mencapai 2.500 paket sembako, 224 paket sembako di antaranya disalurkan di Wonosobo," ungkap Danrem didampingi Dandim 0707 Wonosobo Letkol Czi Wiwid Wahyu Hidayat.

Dandim menjelaskan, TMMD Tahap II Sengkuyung di Desa Pungangan menyasar pembuatan badan jalan sepanjang 1.286 meter dengan lebar 6 meter, kemudian pengerjaan jalan sepanjang 480,76 meter lebar 4 meter, dan gorong-gorong.

Bantuan serupa juga diserahkan Danrem di Kabupaten Temanggung, saat meninjau TMMD di Dusun Kruwisan Desa Banaran Kecamatan Gemawang. Dalam kesempatan tersebut, Danrem didampingi Wakil Bupati Temanggung, Heri Ibnu Wibowo. **(Art/Osy)-o**

Warga Wangunrejo Demo Dana Desa

PATI (KR) - Ratusan warga Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati menggelar aksi demo di kantor desa setempat, Sabtu (18/7). Warga mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 sebesar Rp 2,5 miliar yang dinilai tidak ada transparansi. Peserta demo menduga ada penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 2019 Wangunrejo, karena didapatkan selisih antara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dengan di APBDes Rp 500 juta.

Kepala Desa Wangunrejo, Ali Nurkamid yang ditemui wartawan, membantah adanya penyalahgunaan anggaran seperti yang dituduhkan warga. "Penggunaan anggaran sudah melalui Musyawarah Desa (Musdes)" tegasnya. **(Cuk)-o**

DITJEN HUBDAR SIAPKAN REGULASI BERSEPEDA

Simulasi Adaptasi Baru di Dieng

BANJARNEGARA (KR) - Pemkab Banjarnegara menggelar simulasi adaptasi kebiasaan baru di dua objek wisata yang berada di kawasan Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara, yakni kompleks Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Simulasi dihadiri Sekda Banjarnegara Indarto, melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Unit Pengelola Teknis (UPT) Wisata Dieng, dan pemandu wisata.

Sekda mengatakan simulasi digelar sebagai persiapan membuka kembali destinasi wisata di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdampak pandemi Covid-19, dengan mengedepankan protokol kesehatan. Kebangkitan sektor pariwisata diharapkan akan berdampak terhadap pemulihan perekonomian masyarakat yang sempat lesu selama pandemi Covid-19. "Untuk sementara, objek wisata Dieng boleh dikunjungi wisatawan dari Jawa Tengah dan DIY serta pengunjung yang telah melakukan reservasi," jelasnya.

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banjarnegara, Agung Yusianto, jika simulasi sudah dievaluasi dan berjalan sesuai harapan maka awal Agustus 2020 objek wisata Dieng dan objek wisata lain di wilayah Kabupaten Banjarnegara sudah bisa dibuka.

Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdar) Kementerian Perhubungan saat ini sedang menggarap regulasi untuk para pengguna sepeda dan ditargetkan selesai minggu pertama bulan Agustus 2020. Terkait hal itu, Ditjen Hubdar telah melakukan uji publik di Bandung dan Yogyakarta.

"Ada tiga yang diatur di dalam Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan untuk Perlindungan Keselamatan Pesepeda. Yakni terkait dengan tata cara penggunaannya, infrastruktur jalan, dan sepedanya itu sendiri," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi di Purwokerto, Sabtu (18/7).

Berkaitan dengan masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), Budi Setiyadi menjelaskan, peraturan bersepeda dalam kondisi AKB masih mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor 11 Tahun 2020. Dalam surat edaran tersebut diatur *physical distancing* dan protokol kesehatan dalam penggunaan kendaraan yang digunakan oleh masyarakat, termasuk sepeda. **(Mad/Dri)-o**

KR-Muchtar M

Simulasi adaptasi kebiasaan baru di kompleks Candi Arjuna Dieng.

TARIF BARU 'RAPID TEST' SUDAH DIBERLAKUKAN

Layanan Puskesmas di Sukoharjo Dibatasi

SUKOHARJO (KR) - Pembatasan layanan kesehatan di Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo dikurangi hingga 50 persen, lantaran 33 tenaga kesehatan di lima Puskesmas positif virus Korona. Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo sengaja memberlakukan pembatasan layanan, sebagai antisipasi penambahan dan penyebaran positif virus Korona di kalangan tenaga kesehatan.

Kepala DKK Sukoharjo Yunia Wahdiyati mengatakan, dari 12 Puskesmas yang ada di masing masing kecamatan, empat di antaranya sudah diltutup sementara selama 14 hari. Keempat Puskesmas tersebut yakni Puskesmas Bulu, Mojolaban, Sukoharjo dan Kartasura. Satu Puskesmas lagi yakni Puskesmas Baki, meski ada temuan kasus positif virus Korona namun tidak sampai ditutup. Sebab, tenaga kesehatan yang positif virus Korona bertugas di luar dan tidak melakukan kontak erat di Puskesmas Baki.

DKK Sukoharjo minta kepada Puskesmas di masing masing wilayah aktif memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan baru tersebut. Meski dibatasi, pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas tetap berjalan, kecuali empat Puskesmas yang ditutup sementara. Masyarakat juga diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan," tandasnya, Senin (20/7).

Sementara itu, pola tarif baru *rapid test* mandiri di RSUD Karanganyar dinilai tidak menguntungkan manajemen BLUD. Biaya Rp 150 ribu perlayanan yang berlaku mulai 13 Juli lalu dinilai impas. "Perubahan tarif dari sebelumnya Rp 400.000 menjadi Rp 150.000 perorang didasari Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2875/2020." kata Kabid Layanan Medis (Yanmed) Keperawatan RSUD Karanganyar, dr Kristanto, Senin (20/7).

Dalam surat edaran itu disebutkan batasan tertinggi untuk tarif *rapid test* mandiri adalah Rp 150.000, berlaku bagi pemohon test secara mandiri dan fasilitas kesehatan diminta untuk mengikuti aturan yang diterapkan oleh pemerintah. "Sebelum *rapid test*, pemohon diperiksa sesuai prosedur oleh dokter di poliklinik umum. Biaya surat sehat meliputi pendaftaran dan pemeriksaan hb Rp 60 ribu. Ditambah biaya rapid test Rp 150.000, maka total yang dikeluarkan pemohon Rp 210.000," jelas Kristanto.

Menurutnya, penurunan biasa *rapid test* sesuai instruksi Kementrian Kesehatan itu cukup menyulitkan RSUD selaku BLUD karena tidak ada skema pasti subsidinya. "Secara pola tarif dengan *real cost*, masih rugi, karena sarana prasarana dan jasa pelayanan belum terakomodir. Biaya Rp 150.000 perlayanan, idealnya hanya untuk menebus alat, sedangkan sarana prasarana dan jasa pelayanan terpaksa ditanggung RSUD," ungkapnya. **(Mam/Lim)-o**

HUKUM

POLISI BEKUK SEPASANG KEKASIH

2 Korban Dibunuh dengan Umpan Wanita

PEKALONGAN (KR) - Sepasang kekasih NK (17) dan S (16) yang masih duduk di SMK swasta di Kota Pekalongan, akhirnya ditahan di Mapolresta setempat, Senin (20/7). Setelah terkuak melakukan pembunuhan terhadap temannya sendiri, Muhammad Arya Sofa (17), yang ditemukan tewas dengan luka tusuk di perut dan leher di bantaran Sungai Kalibanger Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Andrian Suez mengungkapkan saat diperiksa tersangka NK mengakui perbuatannya. Ia mengaku bingung lantaran kekasihnya meminta segera dinikahi. Karena butuh biaya, NK mengumpankan kekasihnya menemui korban, untuk diajak kencan.

Korban tidak curiga. Sampai di lokasi yang telah ditentukan, tersangka yang telah menunggu langsung menusuk korban menggunakan pisau hingga 11 tusukan. Kemudian lelaki itu membawa motor korban dan rencananya dijual buat biaya nikah. Tapi motor belum laku, NK berhasil diamankan petugas.

Kapolres menuturkan, lantaran pelaku masih kategori anak, proses hukum dilakukan dengan memperhatikan UU Perlindungan Anak. Melalui sistem peradilan anak akan tetap dilaksanakan. Pelaku dijerat dengan Pasal 365 ayat (3) KUHP, yakni tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Ditambahkan, belakangan setelah kasus itu dikembangkan, diduga kuat sepasang kekasih itu juga terlibat kasus pembunuhan terhadap Surya Maulana Saputra (14), warga Jalan Otto Iskandar Dinata Kalibaros Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang dilaporkan hilang sejak 18 April 2020. "Modus yang dilakukan sama, merampas motor korban. Kini masih terus dilakukan penyelidikan," jelasnya.

Terkait kasus tersebut, Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz SE memberikan santunan kepada keluarga Surya Maulana yang jazadnya ditemukan di belakang bekas dealer mobil, April lalu. Mayat korban ditemukan dalam kondisi telah membusuk.

Mayat tersebut kemudian dimakamkan oleh warga, termasuk ayah korban. Namun ayah korban tidah tahu kalau itu mayat anaknya. Identitas mayat terkuak setelah kasus sama terungkap dan pelaku ditangkap. **(Riy)-o**

OKNUM PERANGKAT DESA DILAPORKAN KE POLISI

Gagal Jadi Sipir, Malah Kena Tipu

BANTUL (KR) - Seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berinisial Sp, dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan terpaksa dilakukan lantaran Sp melakukan penipuan dengan modus bisa memasukkan jadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Kini kasus tersebut ditangani Unit Reskrim Polsek Pundong.

Kasus tersebut mencuat setelah tiga orang melapor ke Polsek Pundong pertengahan Juni lalu. Mereka yang lapor adalah Mujiyono dan Yanu Prasetyo keduanya warga Kretek serta Ny Mariyem warga Sanden. Ketiganya geram lantaran sudah ditipu terlapor. Janjinya bisa memasukkan PNS di Kemenkumham RI sebagai sipir hanya modus. Dalam kasus itu Yanu Prasetyo sudah setor ke Sp Rp 206 juta, kemudian Ny Mariyem Rp 251 juta dan Mujiyono Rp 185 juta.

Kanit Reskrim Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY, Ipda Heru Pracoyo didampingi penyidik Aipda Heru Hariyantoko, Senin (20/7), mengungkapkan kasus tersebut bermula saat ketiga korban akhir Desember 2017 bertemu terlapor di Srihardono Pundong Bantul.

Dalam pertemuan itu ketiga korban bermaksud mendaftarkan anaknya untuk menjadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI. Karena sebelumnya terlapor mengaku punya link yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM.

"Hasil pemeriksaan didapat informasi, jika terlapor ini mengatakan punya orangtua angkat yang bisa memasukkan seseorang menjadi PNS di Kemenkumkam," ujar Heru.

Karena ingin anak segera mendapat pekerjaan dalam pertemuan disepakati tahap awal masing -masing membayar Rp 20 juta. Sementara uang pelicin agar masuk menjadi CPNS di Kemenkumham dipatok kisaran Rp 200 juta.

Kemudian pendaftaran CPNS Kemenkumham 2017/2018 dibuka, korban meminta anaknya mendaftar sebagai sipir dengan penempatan di DIY. Tapi ketika pengumuman tahun 2018 anak dari tiga korban tersebut tidak tercantum namanya. Kemudian mereka bertanya kepada Sp terkait dengan janji yang diungkapkan sebelumnya. "Menurut keterangan para korban, terlapor mengatakan jika penyerahan SK sebagai PNS diundur," jelas Heru.

Setelah didatangi para korban, orang yang diklaim sebagai orangtua angkat berinisial Rs dan terlapor mendatangi rumah Ny Mariyem. Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa SK CPNS Kemenkumham sudah turun sampai di kantor wilayah dan akan diserahkan setelah pemilu. Namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi.

Merasa dirugikan kemudian mereka melaporkan oknum perangkat desa tersebut ke Polsek Pundong. "Penyerahan uang dilakukan secara bertahap sehingga masing-masing korban berbeda. Sekarang sudah kami periksa saksi-saksi dan juga korban, proses terus berjalan," ujar Heru. **(Roy)-o**

Rem Blong Sebabkan Tabrakan Karambol

SLEMAN (KR) - Kecelakaan karambol terjadi di Jalan Wates Km 5 tepatnya Simpang empat Depok, Ambarketawang Gamping Sleman, Senin (20/7). Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan itu, namun kendaraan rusak sehingga pemilik mengalami kerugian materiil.

Kasat Lantas Polres Sleman, AKP Mega Tetuko SIK, mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 02.30. Dijelaskan, semula truk Mitsubishi Nopol D 8081 HL yang dikemudikan Dodi (40) warga Sumedang, berhenti di lokasi karena lampu *traffic light* menyala merah. Di belakangnya, melaju beriringan mobil Daihatshu Ayla Nopol AD 8782 HM yang dikemudikan Desy (32) warga Kulonprogo dan truk Nopol R 8243 R yang dikemudikan Rasito (36) warga Purbalingga.

Kedua kendaraan itu berjalan pelan-pelan bermaksud berhenti di simpang empat di lokasi. Namun tiba-tiba dari belakang melaju tak terkendali truk Fuso Nopol E 9270 B dikemudikan Andri (43) warga Bandung Jawa Barat. "Truk Nopol E 9270 B diduga rem blong sehingga pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraan hingga membentur truk Nopol R 8243 D," ungkap Mega Tetuko.

Setelah itu, lanjutnya, truk yang dikemudikan Rasito terdorong ke depan sehingga membentur mobil Daihatsu Ayla di depannya dan truk Nopol D 8081 HL. Kasat Lantas menambahkan, ada empat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. "Kecelakaan itu menyebabkan kerugian materiil karena kendaraan mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa," ucapnya. **(Ayu)-o**

POLDA DIY AMANKAN 4 TERSANGKA

Pedagang Bakso 'Nyambi' Jualan Pil Koplo

SLEMAN (KR) - Himpitan ekonomi di masa pandemi Covid-19 membuat JW (46) nekat. Sambil berjualan bakso, lelaki warga Sariharjo Ngaglik Sleman ini, juga menjajakan pil koplo. "Saat diamankan, dari tangan pelaku kami berhasil menyita 330 butir pil trihexyphenidyl," ungkap Kasatreskoba Polres Sleman AKP Andyka Pandu, Senin (20/7).

Dari tangan tersangka berhasil disita 330 butir pil trihexyphenidyl dan uang tunai sebesar Rp 220.000. Uang tersebut diduga merupakan penjualan pil koplo sehingga pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Sleman. "Ratusan pil itu disembunyikan di dalam gerobak bakso," ujarnya.

KR-Wahyu Priyanti.

Penjual bakso terjerat kasus narkoba diamankan.

Sementara itu, petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda DIY dipimpin AKBP Hari Triyana SE MH, Jumat (17/7), menangkap empat pelaku penyalahgunaan narkoba. Keempat tersangka masing-masing PM (26) dan MK (24) warga Pajangan Pandowoharjo Sleman, YR (21) warga Condongcatur Depok Timur Sleman serta KT (24) asal Banyuwangi, Jatim.

Dirresnarkoba Polda DIY Kombes Pol Ary Satriyan SIK, Senin (20/7), menjelaskan dari tersangka PM petugas menyita barang bukti 1 HP, 6 botol plastik masing-masing botol berisi 1.000 butir pil Yarindo dan satu kertas bukti transaski.

Dari tangan MK petugas menemukan 6 plastik, masing-masing botol berisi 1.000 butir pil Yarindo.

Berikutnya, petugas menangkap YR (21) di sebuah kafe di Banguntapan Bantul dengan barang bukti 9 toples plastik, 7 pack plastik klip, 3 butir tablet camlet 1 mg Alpraziolam, 22 plastik klip masing-masing isi 10 tablet Trihecyphenidyl, 2 bungkus bekas rokok isi 3 butir tablet camlet, dan handphone.

Selanjutnya petugas menangkap tersangka KT (24) dengan barangbukti 6 botol plastik, masing-masing botol berisi 1.000 tablet Trihexyphenidyl. **(Ayu/Hrd)-o**